PERANAN ILMU PENYULUHAN DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

Rachmat Pambudy
Alumni S-3 Tahun 1999
Staf Pengajar Ilmu Sosial dan Ekonomi Industri Peternakan
Fakultas Peternakan IPB

ABSTRAK

Sektor pertanian sebagai penggerak pembangunan nasional merupakan pilihan pembangunan Indonesia sampai saat ini. Oleh karena itu, beralihnya struktur perekonomian dari pertanian ke industri merupakan rangkaian proses terencana dengan tujuan menciptakan bisnis di tingkat *on-farm*, dan tingkat *off-farm* dengan harapan lahir para *enterpreneur* (wirausaha) tangguh yang mampu memadukan sumber daya alam, modal manusia, dan sosial untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang merata, stabil, dan berkesinambungan. Patut diakui bahwa setiap langkah maju dalam membangun bangsa tersebut tak bisa lepas dari peran penyuluhan sebagai faktor pendukung. Dengan demikian, upaya penataan sistem dan kelembagaan penyuluhan hendaknya dapat disesuaikan dengan perspektif pembangunan pertanian secara menyeluruh dengan tetap berfalsafah pada kebutuhan petani, merupakan proses pendidikan untuk orang dewasa dan bekerjasama. Sedangkan, secara organisatoris, penyuluhan mengupayakan terjadinya alih teknologi pertanian dalam kalangan masyarakat petani yang menjadi perangkat pokok pembangunan pertanian, sehingga dapat memperluas dan memodernisasi sektor pertanian agar mampu memberikan hasil yang lebih baik. Penyuluhan memiliki fungsi pembinaan yang juga difokuskan pada pengembangan bisnis pertanian dalam konteks ekonomi perusahaan. Maka dari itu, jiwa kewirausahaan (*enterpreneurship*) petani menjadi sangat menentukan dalam pengelolaan usahataninya. Oleh karena itu, akan sangat relevan jika proses pembelajaran, fasilitasi, kelembagaan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan penyuluhan juga mengkondisikan kewirausahaan di dalamnya. Meskipun secara langsung tidak ada kaitan antara pendidikan dan semangat wirausaha tetapi dalam menjalankan usahanya, seorang wirausaha perlu memiliki beberapa pengetahuan dasar yang memadai agar usahanya berhasil. Sehubungan dengan itu, sudah waktunya program penyuluhan masa kini diorientasikan kepada pengembangan pendidikan dan semangat wirausaha bagi kalangan petani. Tolok ukur keberhasilan penyuluhan harus bergeser pada kemampuan menciptakan petani-petani *enterpreneur*. Sudah waktunya para petani didorong untuk menjadi pahlawan-pahlawan ekonomi.

PENDAHULUAN

Sejak awal Pelita I, Indonesia telah menetapkan strategi pembangunan nasional dengan memilih sektor pertanian sebagai penggerak pembangunan nasional (*agriculture led development strategy*). Melalui pilihan pembangunan tersebut, selama PJPT I (1969-1994), Indonesia telah mampu: (1) mencapai pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata lebih dari lima persen pertahun; (2) menurunkan jumlah penduduk miskin (absolut maupun persentase); (3) mengupayakan struktur perekonomian nasional (dari pertanian menuju industri); dan (4) meningkatkan tarap hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang bisa dilihat dari indeks mutu hidup dan berbagai indikator kesejahteraan yang berlaku. Indonesia juga telah mampu menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan minimal pangan pokok pada setiap lapisan masyarakat.

Mengupayakan struktur perekonomian dari pertanian ke industri merupakan rangkaian proses terencana dengan tujuan menciptakan bisnis di tingkat *on-farm*, dan tingkat *off-farm*. Baik bisnis di tingkat *on-farm* maupun *off-farm*, diharapkan lahir para *enterpreneur* (wirausaha) tangguh yang mampu memadukan sumber daya alam, modal manusia, dan sosial untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang merata, stabil, dan berkesinambungan.

Patut diakui bahwa setiap langkah maju dalam membangun sektor pertanian tak bisa lepas dari peran penyuluhan sebagai faktor pendukung. Bradfield (1966) menyatakan bahwa penyuluhan telah berkembang sebagai satu-satunya cara yang logis, ilmiah, dan berhasil untuk menyalurkan pengetahuan kepada petani agar lahannya digunakan secara efisien. Dengan mengembangkan sektor pertanian, penyuluhan berperan melayani pembangunan ekonomi suatu bangsa. Bagi kita, membangun pertanian yang efisien, berkesinambungan, dan berdaya saing dapat memecahkan sebagian persoalan masyarakat, bangsa, dan negara.

Sejak lahirnya cikal bakal program penyuluhan di Indonesia pada tahun 1905 (zaman Hindia Belanda) hingga sekarang, kontribusi penyuluhan telah memberi banyak perubahan berarti bagi sektor pertanian pada khususnya dan perekonomian Indonesia pada umumnya. Namun demikian, tantangan dan perubahan yang terjadi dengan cepat dalam lingkungan kehidupan kita menuntut adanya koreksi terhadap sistem, strategi, teknik dan metode penyuluhan. Ditemukannya teknologi baru, seperti bioteknologi, baik dalam proses produksi primer maupun pada tahapan proses produksi berikutnya, memerlukan metode atau pola penyuluhan yang berbeda dengan pola yang bersifat tradisional. Berkembangnya secara pesat teknologi informasi, baik yang melekat dalam proses produksi maupun dalam proses pemasaran serta persyaratan kualitas lingkungan hidup telah mendorong perlunya pembaharuan dalam kelembagaan penyuluhan (Kartasasmita, 1996).

Upaya penataan sistem dan kelembagaan penyuluhan tersebut hendaknya dapat disesuaikan dengan perspektif pembangunan pertanian secara menyeluruh. Jika di masa lalu jumlah petani menjadi salah satu keungggulan komparatif, maka di masa mendatang kualitas sumber daya manusia (modal manusia dan sosial) lebih dominan pengaruhnya terhadap kemajuan pembangunan pertanian dibanding pengaruh kekayaan sumber daya alam. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa faktor-faktor sumber daya manusia yang berkualitas yang mencakup pendidikan dasar yang memadai, kesehatan, kemampuan memperoleh modal, serta kewirausahaan yang baik mampu meningkatkan daya saing yang semakin ketat di pasar global.

Dengan demikian, tingkat investasi dalam bentuk modal manusia *(human capital* dan *local capital)* akan sangat mempengaruhi kemampuan dan kecepatan petani dalam mengadopsi inovasi yang dibutuhkan. Karena itu, masalah penyuluhan menjadi penting. Program penyuluhan tidak hanya ditujukan bagi petani dalam rangka menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing, tetapi juga ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi bagi masyarakat, yang secara langsung akan berimplikasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

SEJARAH PENYULUHAN

Istilah penyuluhan pertama kali muncul di Inggris dan bukannya di Amerika seperti diperkirakan banyak orang (Maunder, 1972). Istilah penyuluhan pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Cambridge tahun 1873 untuk mendiskripsikan suatu inovasi pendidikan khusus. Pendidikan itu diberikan kepada orang kebanyakan di tempat dia tinggal dan bekerja. Gerakan penyuluhan pertanian di Amerika Serikat seperti halnya di Inggris, juga dimulai melalui suatu universitas yaitu dari Universitas Chicago pada tahun 1892.

Salah satu sistem penyuluhan terbaik di dunia ditemukan di Denmark, di mana penyuluhan tidak hanya dilakukan pada tingkat usahatani, tetapi juga pada hulu dan hilirnya dengan melibatkan semua petani partisipan termasuk perguruan tinggi (Bauer *et al.*, 1998).

Di dunia ketiga, penyuluhan pertanian berkembang setelah perang dunia kedua usai. Di Amerika Latin dan Karibia kebanyakan penyuluhan pertanian dimulai tahun 1950. Di negara-negara ASEAN mulai berkembang antara tahun 1960 hingga tahun 1970 (Swason, 1984). Di negara-negara berkembang, penyuluhan dikenal sekitar tahun 70-an sampai 80-an dengan menempatkan pemerintah sebagai pemrakarsa dan masih menitikberatkan penggunaan pendekatan pada *top-down knowlegde transfer*. Dalam perkembangannya sekitar tahun 90-an, telah diperkenalkan perspektif baru di negara-negara berkembang, yaitu *the knowledge system prespective*. Perspektif baru ini berdasar pendekatan yang lebih sesuai dengan pembangunan pertanian secara keseluruhan.

Penyuluhan di beberapa negara juga dilakukan oleh sektor swasta, dengan harapan bisa mempercepat pelembagaan penyuluhan pertanian (Rivera and Gustafson, 1991; Ameur, 1994; dan Kidd *et al.*, 1998). Negara-negara yang tercatat menggunakan peran swasta dalam penyuluhan pertanian memiliki pengalaman kasus yang berbeda-beda (Tabel 1).

Tabel 1. Variasi Pengalaman Negara-negara yang Menggunakan Swasta dalam Penyuluhan Pertanian

Negara	Kasus
Selandia Baru	Komersialisasi penuh penyuluhan publik
Belanda	*Cost-recovery* dari petani
Jerman	Banyak model yang dikembangkan; murni swasta, semi swasta, subsidi lembaga petani, sistem *voucher*
Denmark	Penyuluhan dibentuk oleh organisasi para petani
Cina	Sistem Kontrak dengan kelompok petani
Equador	Bagi hasil keuntungan antara petani dengan penyuluh
Costa Rica	Sistem *voucher* bagi petani kecil untuk mengontrak penyuluh swasta
Chile	Sistem sub-kontrak dan *voucher*
Ethiopia	Pusat penyuluhan swasta
Turki	*Cost-sharing* dalam pembinaan
Kenya	Asosiasi penyuluh dengan *contract out-grower schemes*

Sumber: Bauer *et al.* (1998)

FAO melalui bagian *Extension, Education and Communication Services* mengembangkan strategi baru penyuluhan, yaitu *Strategic Extension Campaign* (SEC) sebagai pendekatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan didesain untuk meningkatkan dampak dari lembaga penyuluhan pertanian yang telah ada (Contado, 1998). SEC secara fungsional menghubungkan penyuluh dengan peneliti dan media lokal, dan konsepnya diperkenalkan oleh FAO di beberapa negara Asia, Afrika dan Amerika Latin. Secara umum, SEC menggunakan pendekatan sistematik yang dimulai dari identifikasi faktor-faktor prioritas di pertanian dan survei partisipatif tentang pengetahuan, sikap, perilaku

(*Knowledge, Attitude, Practice*/KAP) petani serta *know-how* dan teknologi yang mungkin dikembangkan secara lokal.

Di Indonesia, perkembangan penyuluhan mulai tercatat bersamaan dengan berdirinya Departemen Pertanian (*Landbouw*) pada tahun 1905. Pada masa itu, salah satu tugas departemen tersebut adalah menyalurkan hasil penyelidikan pertanian kepada petani. Hal ini dilakukan oleh semacam penyuluh pertanian (*Landbouw-adviseur*) yang ditugaskan secara khusus untuk memberikan nasehat tentang pertanian (Soejitno, 1968). Kemudian, kegiatan penyuluhan pertanian meningkat sejalan dengan didirikannya *Landbouw School* tahun 1908, yang lulusannya diperbantukan pada penasehat pertanian.

Perkembangan penyuluhan tersebut semakin nyata ketika ditemukannya berbagai inovasi bidang pertanian tanaman pangan, khususnya padi ajaib IR5/IR8 (Nasoetion, 1981). Adanya padi ajaib tersebut menjadi awal kebangkitan penyuluhan di Indonesia. Menjelang dan awal Pelita I, melalui program Bimbingan Massal Intensifikasi Massal (Bimas-Inmas), penyuluhan dilakukan secara besar-besaran. Kegiatan penyuluhan umumnya berorientasi meningkatkan produksi bahan makanan pokok rakyat Indonesia yaitu beras (Hasmosoewignyo dan Garnadi, 1962). Puncak pengaruh pelaksanaan penyuluhan adalah sukses Indonesia mencapai swasembada beras, yang diakui secara internasional pada sidang FAO tahun 1985 di Roma.

Pada tahun 1993, ketika hampir semua produk pertanian telah mampu meningkat secara nyata dan cenderung muncul kelebihan produksi pada taraf harga tertentu, kegiatan penyuluhan yang berorientasi hanya pada peningkatan produksi saja perlu dipertanyakan kembali. Falsafah yang selama ini diketahui hanya sekedar meningkatkan produksi perlu dikaji kembali. Selain itu, kelembagaan/institusi (pendidikan/pemerintahan/birokrasi) yang dibangun dengan orientasi peningkatan produksi dari sektor pertanian (termasuk subsektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan) juga perlu ditinjau kembali.

Sejarah penyuluhan pertanian di Indonesia menjelaskan tiga tahapan perkembangan yang sejalan dengan perkembangan pembangunan pertanian sejak Indonesia merdeka, yaitu:

Penyuluhan Pertanian Tahun 1945-1969

Setelah Proklamasi Kemerdekaan (1945-1950) dikembangkan *Plan Kasimo* yang meliputi rencana produksi pertanian tiga tahun (1948-1950), namun *plan* itu dinyatakan gagal karena terganggu gejolak revolusi fisik. Setelah adanya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia (1950-1959), *Plan Kasimo* yang belum sempat dilaksanakan diganti dengan **Rencana** Wacaksono, yang kemudian menjadi **Rencana Kesejahteraan Istimewa** (RKI) dengan tujuan : (1) memperbanyak produksi benih unggul dengan cara menambah Balai Benih dan Kebun Bibit; (2) perbaikan dan perluasan pengairan pedesaan; (3) peningkatan penggunaan pupuk; (4) peningkatan pemberantasan hama; dan (5) meningkatkan pendidikan masyarakat pedesaan dengan mendirikan Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD).

Awal tahun 1950, dalam subsektor peternakan, khususnya usaha peternakan ayam ras, mulai dirintis kegiatan impor ayam ras. Tahap perintisan berjalan sekitar 10 tahun (1950-1961) sampai terselenggaranya Pameran Perunggasan di Senayan Jakarta, September 1961 (Perunggasan Indonesia, 1987:26). Tahun 1958, muncul gagasan **Intensifikasi Produksi Padi** yang dipusatkan di sentra-sentra produksi sampai mencapai luas 1000 Ha, yang disebut Padi Sentra. Sistem ini belum dapat dikatakan berhasil karena banyak terjadi penyelewengan kredit, pasar yang buruk, kurangnya keahlian dalam penyuluhan, pelayanan dan pemasaran.

Masa tahun 1959-1969, yang dikenal dengan **Periode Terpimpin**, telah terjadi banyak perubahan. Motto *alon-alon asal kelakon* diubah menjadi cepat dan tepat. Masa ini mulai menggunakan pola **penggerakan massa**, dan juga **pendekatan perorangan.** Sistem tetesan minyak diganti dengan sistem tumpahan air sehingga terjadi pelayanan yang lebih merata. Sementara itu pola **Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap I** mulai dilaksanakan. Aktivitas unggul lainnya telah digerakkan melalui **Gerakan Swa Sembada Beras** (SSB) mulai dari tingkat nasional sampai pedesaan, dengan pimpinan **Komando Operasi Gerakan Makmur** (KOGM) pada setiap tingkat operasi. Dikembangkan pula Swa Sembada Bahan Makanan (SSBM) yang mirip dengan gerakan komando tersebut, namun gerakan ini tak sesuai dengan konsep penyuluhan sehingga dinilai kurang berhasil. Dalam salah satu bagian pidatonya ketika meresmikan kampus IPB Baranangsiang, Presiden Soeharto mengatakan bahwa masalah penyuluhan adalah masalah hidup-mati bangsa.

Pada masa ini, muncul gagasan untuk mengembalikan konsep penyuluhan pertanian berasaskan **kesukarelaan, otoaktivitas, demokratis** dan lain-lain yang dipimpin oleh Departemen Pertanian dengan berbagai pihak sebagai pelaksana, yaitu Pelaksana Penyuluh Pertanian, Jawatan Pertanian Rakyat, fakultas-fakultas Pertanian, Organisasi Masa Tani dan Tokoh-tokoh Penyuluhan Pertanian yang ada saat itu dengan dua tujuan utama : (1) memprogresifkan pendekatan penyuluhan; dan (2) membangun organisasi penyuluhan pertanian.

Bersamaan dengan usaha itu, Institut Pertanian Bogor (IPB) mencoba *pilot project* cara penyuluhan efektif guna meningkatkan produksi padi, yang dikenal sebagai Demonstrasi Massal SSBM. Gerakan memotivasi petani yang sangat memuaskan ini kemudian diperluas lagi hingga mencapai 150.000 Ha dengan nama baru Bimbingan Massal SSBM atau **BIMAS SSBM**. Program tersebut menjadi cikal bakal program Bimas setelah mengalami serangkaian perbaikan melalui Bimas Berdikari, Bimas Biasa, Bimas Baru, Bimas Gotong-Royong, dan Bimas yang Disempurnakan.

Bimas kemudian berkembang menjadi Intensifikasi Massal (Inmas) di mana petani peserta Bimas dengan bantuan kredit pemerintah dibina agar mampu berdiri sendiri. Kedua sistem tersebut mengakomodasi kegiatan penyuluhan melalui Pendekatan Kelompok dalam satu wilayah unit Desa (WILUD) di mana dikembangkan para Penyuluh Sukarela yang berasal dari petani sendiri dan disebut Kontak Tani. Dalam gugusan kontak tani tersebut secara rutin ada pembinaan, demonstrasi, surat menyurat bahkan Penyuluhan Massal dan mengawali pengembangan program melalui penggunaan radio, pameran, penerbitan, dan pemutaran film.

Penyuluhan Pertanian Pada PJPT I

Pada REPELITA I (1969-1974), penyuluhan pertanian mulai ditata sistematik dan dirintis lebih terprogram dengan baik. Hal itu sejalan dengan tujuan REPELITA yang menjadikan bidang pertanian sebagai titik sentral pembangunan nasional dengan sasaran utama swasembada pangan, khususnya beras. Melalui peningkatan kemampuan aparat penyuluh, maka diangkat tenaga sarjana pertanian menjadi Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS), tenaga Sarjana Muda menjadi Penyuluh Pertanian Madya (PPM), dan tenaga SPMA menjadi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

REPELITA II (1974-1979), ditandai dengan pemantapan organisasi penyuluhan, yakni dilakukannya pemisahan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan berdasar Keppres No.44 dan 45 dengan SK Mentan No.468/Kpts/Org/12/1975 tanggal 25 Desember 1975, yang menyatakan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab pembinaan teknis dalam penyelenggaraan pendidikan latihan dan penyuluhan pertanian yang berada di daerah, beralih dari pengelolaan semua Direktorat Jenderal dalam lingkungan Departemen Pertanian kepada Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian (Diklatluh), Departemen Pertanian (BPLPP).

Agar Diklatluh dapat menjalankan fungsinya, di daerah telah dibangun Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan pada tahun 1976 didirikan pula Balai Informasi Pertanian (BIP) sebagai UPT-Penyuluhan Pertanian Pusat di Daerah. Selain itu ada UPT Pendidikan formal, berupa SPP (Sekolah Pertanian Pembangunan) yang terdiri atas SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas), SNAKMA (Sekolah Peternakan Menengah Atas), SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah), dan SPDMA (Sekolah Perikanan Darat Menengah Atas), di samping ada juga UPT-Latihan Pegawai seperti BLPP (Balai Latihan Pegawai Pertanian) dan BKPI (Balai Keterampilan Penangkapan Ikan) tersebar di semua provinsi.

Kebijakan lain yang berorientasi mendukung fungsi kepenyuluhan adalah pembentukan Kelompok Kerja Penasehat Penyuluhan Pertanian (KKP3) untuk tingkat Pusat. Di tingkat Daerah dibentuk Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian TK I (FKPP I) dan FKPP II untuk tingkat Kabupaten/Kodya.

Masih berkaitan dengan penyempurnaan fungsi penyuluhan, melalui SK Mentan No. 240/Kepts/Um/4/1979, tanggal 2 April 1979 dibentuk Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) dan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) dengan luas mencapai 1.000 Ha, di mana satu WKBPP terdiri atas 3-10 WKPP. Kelengkapan lainnya adalah bahwa kegiatan PPL dilakukan dengan sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU) dan setiap WKPP dibagi dalam 16 Wilayah Kelompok (WILKEL). Sistem Kerja LAKU ini dilancarkan pula oleh pelaksanaan Proyek Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan (NFCEP) yang dikelola dari Dirjen Tanaman Pangan dengan bantuan Bank Dunia (IBRD).

Selanjutnya, berdasarkan SK Sekretaris Bimas No. 032/SK/III/BPB/8/1975 tanggal 30 Agustus 1975 penugasan penyuluh pertanian diatur sebagai berikut : (1) PPS aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan Bimas/Inmas; (2) PPS aktif membimbing PPL dalam tugasnya melalui kerjasama dengan dinas-dinas; (3) PPS dan PPL (termasuk PPM) adalah Pegawai Departemen Pertanian, dan bukan Pegawai Daerah/Pemda dengan tugas pokok menyebar informasi, mengajarkan keterampilan, memberikan saran/rekomendasi usahatani, mengikhtiarkan peningkatan produksi, fasilitas dan bahan informasi pertanian yang diperlukan dan mengadakan penilaian serta membantu pengadaan percobaan di lapangan.

Pada REPELITA III (1979-1984), fenomena penting dalam penataan penyuluhan pertanian berkaitan dengan perluasan Organisasi Departemen Pertanian, yang meliputi pembentukan Direktorat Penyuluhan di tiap Direktorat Jenderal, di samping Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian yang telah ada. Sejak 1983, di tingkat Pusat ada Direktorat Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan dan Direktorat Penyuluhan Peternakan yang dikoordinasikan oleh Ditlatluh.

Dalam REPELITA IV (1984-1988) dan REPELITA V (1989-1993), terbit pedoman penyelenggaraan penyuluhan melalui SK Mentan No.482/Kpts/LP.120/7/1985; SK Mentan No.143/Kpts/LP.120/3/1985 dan pedoman pelaksanaannya dikeluarkan oleh Diklatluh. Ketetapan terakhir berupa SKB Mendagri-Mentan: nomor 59 Tahun 1968-695/Kpts/LP.120/II/1986 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Status dan jabatan fungsional dari para penyuluh telah diatur dalam SK Menpan No.73/1985 dan Surat Edaran Bersama Mentan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 17/Kpts/LP.401/I/1986-1/SE/1986 tentang Pengertian dan Falsafah Penyuluhan Pertanian; Prinsip-Prinsip dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian; dan Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, seperti: Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BPP; Susunan Organisasi BPP; Wilayah Kerja BPP; Rencana dan Program Penyuluhan; Penyelengaraan dan Hubungan Kerja Penyuluhan Pertanian; Pengelolaan BPP; Kepegawaian; dan Pembiayaan BPP.

Penyuluhan Pertanian Pada PJPT II

Melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor: 54 Tahun 1996-301/Kpts/LP.120/4/96, ternyata penyuluhan pertanian tetap dianggap sebagai sistem pendidikan nonformal di bidang pertanian bagi para petani-peternak-nelayan dan keluarganya. Ditekankan bahwa informasi pertanian merupakan suatu data/bahan yang diperlukan oleh penyuluh pertanian, petani-peternak-nelayan dan masyarakat pertanian. Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) adalah unit kerja penyuluhan pertanian yang secara organik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) serta Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) bertugas menyusun program penyuluhan, membimbing penyusunan rencana kerja penyuluh dan melakukan kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. Rencana kegiatan pendayagunaan segala sumberdaya penyuluhan pertanian tersebut di berbagai tingkat disesuaikan berdasar prinsip kerjasama yang serasi, selaras dan terpadu.

FALSAFAH PENYULUHAN

Dalam kegiatannya, ada beberapa falsafah penyuluhan yang harus dipegang dan disadari oleh seorang penyuluh, yaitu :

- Penyuluhan menyandarkan programnya pada kebutuhan petani;

- Penyuluhan merupakan proses pendidikan untuk orang dewasa (andragogi) yang bersifat nonformal yang bertujuan mengajar petani meningkatkan kehidupannya dengan usaha sendiri, serta mengajar petani menggunakan sumber daya alam secara bijaksana;
- Penyuluh bekerjasama dengan organisasi lainnya untuk mengembangkan individu, kelompok, dan bangsa.

Namun demikian, falsafah penyuluhan juga dapat dikembangkan berdasar metode atau pendekatannya (Tabel 2). Falsafah-falsafah tersebut harus benar-benar dipahami agar kegiatan penyuluhan tidak terpaku hanya pada upaya untuk peningkatan produksi saja. Informasi/inovasi lain yang tidak sekedar untuk meningkatkan produksi sektor pertanian perlu diperhatikan dengan cermat untuk disebarluaskan agar dapat diadopsi oleh petani. Berdasarkan falsafah penyuluhan saat ini yang berorientasi pada kesejahteraan petani, maka peningkatan pada produksi saja belum menjamin terwujudnya hal tersebut. Untuk menjawab tantangan bidang penyuluhan seperti itu reorientasi dari kelembagaan lain yang erat kaitannya dengan bidang penyuluhan perlu dipikirkan.

Adanya tantangan yang semakin kompleks, yaitu bukan hanya kebutuhan meningkatkan produksi pertanian, diperlukan cara-cara untuk menghasilkan produk-produk pertanian secara efisien pada tingkat/derajat tertentu (baku, olahan, atau hasil industri) yang memungkinkan petani pada akhirnya memperoleh pendapatan yang memadai. Petani tidak boleh berhenti berusaha pada tingkat usahatani (*on farm level*/penghasil bahan baku), tetapi hendaknya dapat diusahakan mampu sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi (*off farm level*/pengolahan, pengemasan dan pemasaran), karena pendapatan terbesar justru dapat diraih di tingkat yang lebih tinggi itu. Hal ini tidak hanya berlaku di Indonesia, di Amerika Serikat pun, pendapatan petani pada tingkat *on farm* hanya 30 persen dan 70 persen sisanya berada di *off farm* (Downey dan Ericson, 1990; Cramer dan Jensen, 1991).

Konstelasi seperti itu antara lain menyebabkan masalah dalam penyebaran informasi, karena kegiatan penyuluhan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Tantangan itu ialah bagaimana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui proses penyuluhan agar mampu menghadapi perubahan yang semakin beragam. Selain itu, informasi yang disebarkan dan yang perlu diterima tidak hanya semakin beragam, melainkan juga semakin banyak jumlahnya, sehingga di masa-masa yang akan datang hal tersebut dapat menjadi masalah tersendiri yang perlu dipecahkan (Nasoetion, 1985).

Tabel 2. Falsafah Dasar Penyuluhan Pertanian Berdasarkan Metodanya

- Penyuluhan secara paksa *(forced)*
  - Menggunakan tekanan yang sah (peraturan-peraturan dan hukuman-hukuman);
  - Perintah *top down;*
  - efektif pada fase awal pembangunan, ketika sebagian besar petani gurem (buta huruf) dan primitif hidup.
- Penyuluhan ekonomi (*economic*)
  - menggunakan insentif ekonomi :
    - distribusi bebas;
    - menyediakan subsidi-subsidi;
    - menyediakan bunga pinjaman yang rendah.
  - efektif ketika petani berorientasi (komersial) dan kekurangan modal.
- Penyuluhan pendidikan (*educational*)
  - mendorong minat belajar
  - membangkitkan pemikiran secara ilmiah :
    - menyediakan bahan bacaan;
    - organisasi kelompok belajar;
    - menyediakan kursus-kursus jangka pendek.
  - efektif ketika level pendidikan petani mencapai setingkat lebih tinggi dari pendidikan dasar.
- Penyuluhan secara menyeluruh (*comprehensive*)
  - pembentukan dasar hukum
  - menggunakan insentif ekonomi :
    - bantuan harga (subsidi);
    - menyediakan asuransi (jaminan untuk resiko);
    - memperhatikan pemasaran.
  - menggunakan pendekatan pendidikan
  - koordinasi dengan kebijakan :
    - program pembangunan masyarakat;
    - proyek kesejahteraan pedesaan.
  - efektif ketika ekonomi petani mengalami lebih banyak kesulitan

Sumber : Kim (1990)

PERANAN PENYULUHAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

Secara organisatoris, penyuluhan juga merupakan subsistem dari pembangunan pertanian. Penyuluhan pertanian menjadi penting karena mengupayakan terjadinya alih teknologi pertanian dalam kalangan masyarakat petani yang menjadi perangkat pokok pembangunan pertanian, sehingga dapat memperluas dan memodernisasi sektor pertanian agar mampu memberikan hasil yang lebih baik.

Proses alih teknologi dalam penyuluhan pertanian diwujudkan dalam bentuk kegiatan pendidikan nonformal, dengan tujuan meningkatkan aspek kognisi (pengetahuan), afeksi (sikap mental), dan psikomotor (keterampilan) dari para petani. Peningkatan ketiga kawasan pendidikan tersebut tidak sekedar membentuk "peningkatan kinerja usaha pertanian" sesuai dengan tujuan pembangunan pertanian, namun harus juga dalam jangka panjang berorientasi pada aspek ekonomis. Difusi dan diseminasi berbagai teknologi pertanian yang relevan di kalangan masyarakat petani akan mendorong terwujudnya upaya menjadikan produk-produk pertanian sebagai salah satu komoditas penting yang mampu pula memberikan sumbangan bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan nasional.

Ahli yang mengungkapkan peranan penyuluhan dalam pembangunan masyarakat pedesaan antara lain adalah Rogers (1983). Penyuluhan digambarkannya sebagai aktivitas yang menjembatani dua subsistem dalam alur teknologi, subsistem klien pengguna teknologi di satu pihak dan subsistem sumber teknologi di pihak lainnya. Posisi sistem penyuluh sebagai jembatan tersebut digambarkan sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

Sebaliknya, sebagai bagian dari sistem klien, penyuluhan harus dapat mengungkapkan berbagai umpan balik tentang aplikasi dari berbagai teknologi yang diterapkan sehingga dapat menjadi komponen pertimbangan bagi sistem sumber penghasil teknologi. Dengan demikian, pengembangan berbagai teknologi akan menjadi relevan serta mempunyai nilai dan hasil guna.

Ahli lain yang mengungkapkan kedudukan dan peranan penyuluhan dalam pembangunan pertanian adalah Lionberger (1982). Kedudukan penyuluhan tersebut digambarkan dalam keterkaitan empat subsistem. Sebagaimana diungkapkan oleh Rogers, penyuluhan pertanian mempunyai posisi dan peranan sebagai penghubung antara sistem sosial masyarakat pengguna informasi dan sistem penyusun dan pengemas informasi (Gambar 2), maka Lionberger mengungkapkan keterkaitan tersebut pada Gambar 2 sebagai alur penyebaran informasi yang bergerak dari teori ke praktek di lapangan. Rangkaian aktivitas dalam alur tersebut diungkapkannya sebagai berikut:

"(1) *test theory and add to basic scientific knowledge;* (2) *try to intervene in the scientific process;* (3) *invent something potentially useful;* (4) *test it locally to determine if it: will work, is feasible, and will fit inn;* (5) *disseminate the locally tested knowledge;* dan (6) *put the locally validated information to use.*"

Gambar 1. Peranan Penyuluhan Sebagai Jembatan dalam Alur Teknologi

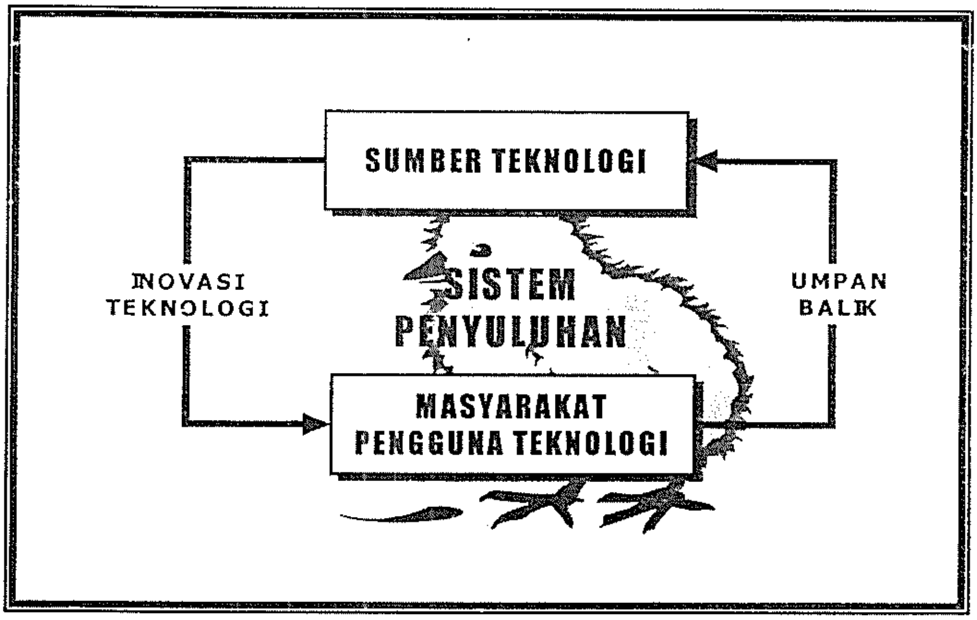

Rangkaian aktivitas (1) sampai dengan (4) merupakan aktivitas dari subsistem *scientist*, baik *basic* maupun *applied*. Subsistem penyuluhan pertanian bertugas dalam mendiseminasikan pengetahuan (informasi) yang sudah teruji secara lokal, sementara sistem sosial masyarakat berperan sebagai pengguna teknologi/informasi dalam praktek usahatani mereka.

Gambar 2. Posisi dan Peranan Penyuluhan dalam Alur Penyebaran Informasi (Lionberger, 1992)

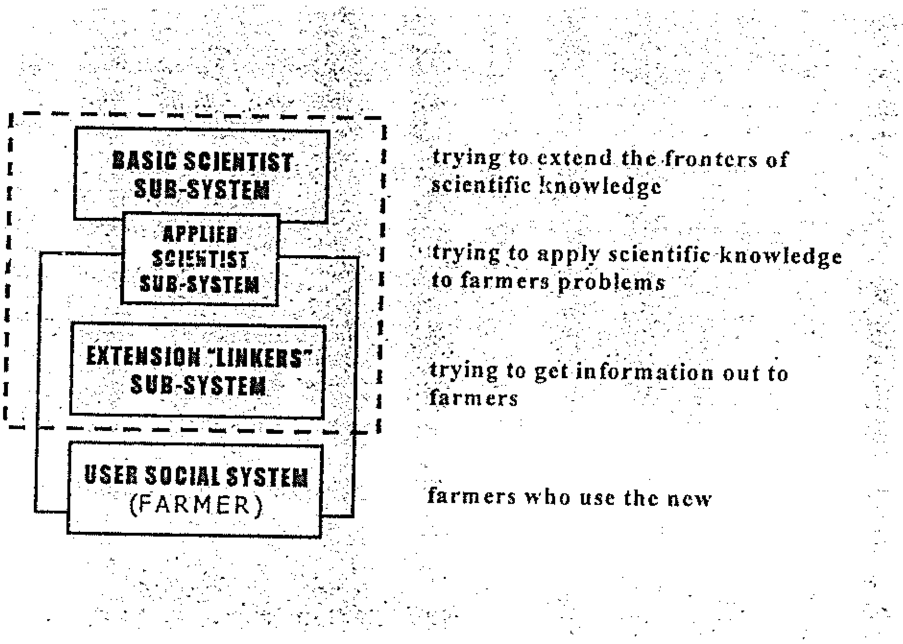

PENYULUHAN DALAM MERUBAH PERILAKU KEWIRAUSAHAAN PETANI

Saat ini, penyuluhan memiliki fungsi pembinaan yang difokuskan bukan hanya pada teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian, melainkan juga pengembangan bisnis pertanian dalam konteks ekonomi perusahaan. Maka dari itu, jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) petani menjadi sangat menentukan dalam pengelolaan usahataninya (Roling and Groot, 1998). Oleh karena itu akan sangat relevan jika proses pembelajaran, fasilitasi, kelembagaan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan penyuluhan juga mengkondisikan kewirausahaan di dalamnya.

Wirausaha adalah individu yang memiliki pengendalian tertentu terhadap alat-alat produksi dan menghasilkan lebih banyak daripada yang dapat dikonsumsinya atau dijual atau ditukarkan agar memperoleh pendapatan (McClelland, 1961). Casson, (1993), menyatakan bahwa istilah wirausaha (*entrepreneur*) diungkapkan pertama kali oleh R. Cantillon (1697-1734), seorang ekonom Irlandia, keturunan Perancis. Menurut rumusan awal Cantillon, *entrepreneur* adalah ahlinya mengambil risiko. Menurut Schumpeter wirausaha adalah orang yang menghasilkan kombinasi baru dengan cara memperkenalkan produk-produk atau proses-proses atau mengantisipasi pasar ekspor atau mengkreasikan tipe organisasi baru.

Dalam pandangan Schumpeter, seorang wirausaha memimpin suatu industri baru yang bisa menghasilkan perubahan struktural, pertumbuhan ekonomi dan siklus bisnis dengan cara mengkombinasikan ide-ide ekonomi dan psikologi (Casson, 1993). Selanjutnya, Schumpeter (Bygrave, 1996) juga mengartikan wirausaha sebagai orang yang menghancurkan orde ekonomi yang sudah ada dengan memperkenalkan produk dan jasa baru, menciptakan bentuk organisasi baru, atau dengan mengeksploitasi bahan baku baru. Kemampuan orang tersebut, menurut Meredith (1996:2), karena adanya peluang yang diperoleh dan mampu menciptakan organisasi untuk mengejar peluang tersebut.

Kewirausahaan bukanlah sesuatu yang baru dalam ekonomi. Istilah kewirausahaan telah digunakan setidaknya 150 tahun, dan konsepnya telah ada selama 200 tahun (Bygrave, 1987). Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang dikarakterisasi oleh kepemilikan swasta, yang digunakan oleh pemiliknya untuk memperoleh laba bagi dirinya. Sekelompok industrialis sukses ini disebut sebagai *entrepreneur* yang dalam bahasa Perancis berarti melaksanakan tugas.

Sejak tahun 1979, penelitian penciptaan pekerjaan telah membuat wirausaha menjadi pahlawan (Bygrave, 1987), di mana wirausaha adalah pencipta kekayaan melalui inovasi, wirausaha adalah pusat pertumbuhan pekerjaan dan ekonomi, dan wirausaha memberikan mekanisme pembagian kekayaan yang bergantung pada inovasi, kerja keras, dan pengambilan risiko. Jadi, wirausaha memberikan metoda redistribusi kekayaan yang wajar dan sama rata.

Kewirausahaan merupakan hasil suatu proses pengaplikasian kreativitas dan inovasi secara sistematis dan disiplin dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan menangkap berbagai peluang di pasar (Zimmerer dan Scarborough, 1996). Maka dari itu, kewirausahaan melibatkan strategi fokus terhadap ide-ide dan pandangan baru untuk menciptakan produk atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah konsumen. Sedangkan wirausaha adalah orang yang mengawinkan ide-ide kreatif dengan tindakan yang bertujuan dan berstruktur dari bisnis. Jadi, kewirausahaan yang berhasil adalah proses konstan dari kreativitas, inovasi, sampai aplikasinya di pasar (Gambar 3).

Menurut Meredith dkk. (1996), wirausaha adalah individu-individu yang berorientasi kepada tindakan, dan bermotivasi tinggi, serta berani mengambil risiko dalam mengejar tujuannya. Dengan demikian, wirausaha memiliki karakteristik percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil risiko, mandiri, inisiatif, energik, dan bekerja keras. Selain itu, wirausaha juga memiliki kemampuan untuk memimpin, berjiwa inovatif, kreatif, dan berorientasi masa depan.

Gambar 3. Rantai Kewirausahaan

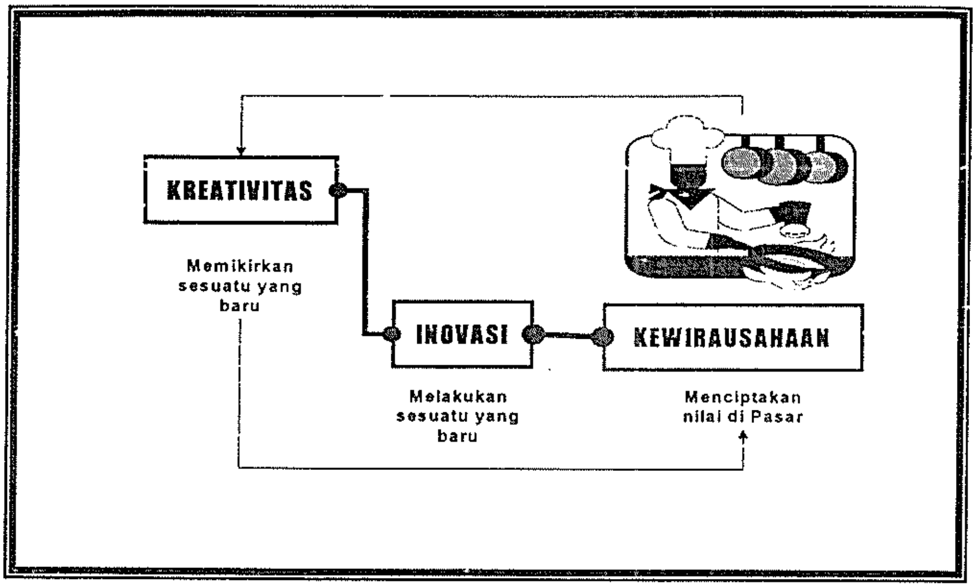

Dalam kaitan pengetahuan dan keterampilan manajemen keuangan, seorang wirausaha juga harus mampu mencari sumber pendanaan bagi pengembangan usahanya (Ratnatunga, Romano dan Laurens, 1993). Sedangkan dalam rangka meningkatkan usaha penjualanya wirausaha juga harus mampu menjual hasil produksinya melalui penerapan strategi dan teknik pemasaran yang harus dikuasainya (Gerson, 1994).

Lebih lanjut Bygrave (1996) menyebutkan sifat-sifat penting dari wirausaha, yaitu yang dikenal dengan *Ten-D* (Tabel 3). Wirausaha bukan hanya sekedar pengetahuan praktis, tetapi lebih cenderung pada suatu gaya hidup dan prinsip-prinsip tertentu yang akan mempengaruhi kinerja usaha (Meredith dkk., 1996). Jika hal ini dimiliki oleh semua petani, maka dapat dipastikan pertanian akan lebih tumbuh dan berkembang dengan pesat. Namun bukan berarti bahwa wirausaha tidak bisa diajarkan sebagai ilmu, karena banyak fakta menunjukkan bahwa wirausaha yang berhasil juga berasal dari lembaga pendidikan kewirausahaan.

Tabel 3. Sifat-Sifat Penting Wirausaha

Dream (mimpi)	Memiliki visi masa depan dan kemampuan mencapai visi tersebut
Decisiveness (ketegasan)	Tidak menangguhkan waktu dan membuat keputusan dengan cepat
Doers (pelaku)	Melaksanakan secepat mungkin
Determination (ketetapan hati)	Komitmen total, pantang menyerah
Dedication (pengabdian)	Pengabdian total, tak kenal lelah
Devotion (kesetiaan)	Mencintai apa yang dikerjakan
Details (terperinci)	Menguasai rincian yang bersifat kritis
Destiny (nasib)	Bertanggungjawab atas nasib sendiri
Dollars (uang)	Kaya bukan motivator utama, uang lebih berarti sebagai ukuran kesuksesan
Distribute (distribusi)	Mendistribusikan kepemilikan usahanya kepada karyawan kunci yang merupakan faktor penting bagi kesuksesan usahanya

Pengembangan wirausaha dan kewirausahaan tidak dapat dilepaskan dari peranan suatu negara dalam memilih strategi perekonomian nasionalnya. Selain itu, pengembangan wirausaha dan kewirausahaan juga sangat erat dengan kecenderungan perekonomian nasional dan global. Perkembangan dan perubahan yang terjadi baik dalam skala nasional maupun global menyebabkan wirausaha juga harus selalu cepat menanggapinya. Hiamm dan Olander (1996) menyatakan perlunya mengembangkan proses baru dalam kewirausahaan. Proses baru itu mencakup antara lain, membangkitkan banyak ide bisnis, mencari berbagai alternatif pembiayaan, mengembangkan jaringan antar bisnis serta selalu mengulang untuk memperbarui bisnis agar selalu inovatif dan unggul di antara para pesaingnya.

Bagi petani yang ingin mengembangkan usahanya selain perlu memahami aspek kewirausahaan juga harus mampu mengadopsi segala hal yang diperlukan untuk menjadi wirausaha yang tangguh. Kesalahan wirausaha Asia pada umumnya hanya mampu memenangkan transaksi sesaat, tanpa diikuti kemampuan mencipta hal-hal inovatif yang menyebabkan usahanya langgeng (Farrel, 1998). Selain itu pola kapitalisme perkoncoan (*crony-capitalism*) juga sangat menghambat pertumbuhan wirausaha yang tangguh. Dalam konteks makro, Ormerod (1995) menyatakan bahwa masyarakat wirausaha dan pemerintahan yang memiliki visi yang baik sangat besar pengaruhnya dalam kemajuan suatu negara.

PENUTUP

Meskipun secara langsung tidak ada kaitan antara pendidikan dan semangat wirausaha tetapi dalam menjalankan usahanya, seorang wirausaha perlu memiliki beberapa pengetahuan dasar yang memadai agar usahanya berhasil. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan, 23 persen kegagalan bisnis baru diakibatkan kurangnya pengetahuan bisnis pelakunya (Megginson, Scott dan Megginson, 1991). Scarborough dan Zimmerer (1993) menyatakan bahwa keburukan manajemen, kurang pengalaman dan pengawasan keuangan yang buruk merupakan hal-hal yang menjadi kegagalan wirausaha dalam mengembangkan usahanya.

Sehubungan dengan itu, sudah waktunya program penyuluhan masa kini diorientasikan kepada pengembangan pendidikan dan semangat wirausaha bagi kalangan petani. Tolok ukur keberhasilan penyuluhan harus bergeser pada kemampuan menciptakan petani-petani *entrepreneur*. Sudah waktunya para petani didorong untuk menjadi pahlawan-pahlawan ekonomi, dan bukan menjadi tikus-tikus lapar di dalam lumbung padi !

DAFTAR PUSTAKA

Ameur, C. 1994. *Agricultural Extension: A Step Beyond the Next Step*. World Bank Technical Paper No. 247. Washington D. C. The World Bank.

Anonim. 1996. *Repelita VI Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Republik Indonesia, Jakarta.

________. 1985. *Agricultural Research and Extension : An Evaluation of the World Bank's Experience*. The World Bank, Washington D.C.

________. 1993. *Agribisnis Seri I*. Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian Departemen Pertanian, Jakarta.

________. 1996. *Repelita VI Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Republik Indonesia, Jakarta.

Badan Pendidikan Latihan dan Penyuluhan Pertanian. 1987. *Rencana Program dan Proyek Badan Diklatluh Departemen Pertanian Tahun 1987/1988.* Departemen Pertanian, Jakarta.

Bauer, E., V. Hoffmann, and P. Keller. 1998. *Agricultural Extension Down The Ages.* Agriculture dan Rural Development: volume 5 nomor 1.

Bradfield, D.J. 1971. *Guide to Extension Training.* (3rd ed.). FAO, Rome, Italy.

Bygrave, W.D. 1987. *The Portable MBA Entrepreneurship.* John Wiley dan Soons, Inc., USA.

________. 1996. *The Portable MBA Entrepreneurship.* Binarupa Aksara. Jakarta.

Cramer, G.L., and C. W. Jensen. 1991. *Agricultural Economics dan Agribusiness.* John Wiley & Sons, New York.

Departemen Pertanian RI. 1990. *Repelita V Pertanian.* Departemen Pertanian Republik Indonesia, Jakarta.

Downey, W.D., and S. Ericksen. 1989. *Manajemen Agribisnis.* Erlangga. Jakarta.

Gerson, R.F. 1994. *Markcting Strategies for Small Businesses:Practical Marketing Techniques dan Tactics.* Crisp Publications.

Hasmosoewignjo dan A. Garnadi. 1962. *Penjuluhan kepada Rakjat Tani Usaha Swa Sembada Beras.* Djawatan Pertanian Djakarta, Djakarta.

Hiam, A. W., and K. W. Oldaner. 1996. *The Entrepreneur's Complete Sourcebook.* Prentice Hall, USA.

Kartasasmita, G. 1996. *Membangun Pertanian Abad-21 : Menuju Pertanian yang Berkebudayaan Industri* (Makalah Disajikan Pada Dies Natalis ke-33 Institut Pertanian Bogor). Badan Perencana Pembangunan Nasional, Jakarta.

Kidd, A., J. Lamers, and V. Hoffmann. 1998. *Towards Pluralism in Agricultural Extension: A growing challenge to the public dan private sectors.* Agriculture dan Rural Development: volume 5 nomor 1.

Kim, S.S. 1990. "Extension Education Programmes for Young Farmers dan Farm Leaders." Dalam *Young Successor Farmers in Asia dan The Pacific : report of study meeting.* Asian Productivity Organization. Korea.

Maunder, A.H. 1972. *Agricultural Extension: A Reference Manual.* Food dan Agriculture Organization of The United Nations, Rome.

Megginson, L.C., C.R. Scott, and W.L. Megginson. 1991. *Successful Small Business Management.* Richard D. Irwin, Inc. Boston.

Meredith, G. G., R. E. Nelson, and P. A. Neck. 1996. *Kewirausahaan: Teori dan Praktek.* PT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.

Nasoetion, A.H. 1981. *"Daun-daun Berserakan." Percikan Pemikiran Mengenai Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan.* Inti Sarana Aksara. Jakarta.

________. 1981. "Padi Ajaib dan Repelita." 1968. Dalam *Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia.* Perkembangan Pemikiran 1965-1981. Kompas dan PT. Gramedia. Jakarta.

Ormerod, P. 1994. *The Death of Economics.* Faber dan Faber, England.

Perunggasan Indonesia. 1987. *Perumusan dan Hasil Lokakarya Perunggasan Nasional (Logasnas) 1987.* Panitia Logasnas 1987, Jakarta.

Ratnatunga, J., C. Romano, and L. Lourens, 1993. *Financial Entrepreneurship in the Small Firm.* Addison-Wesley Publishing Company. Australia.

Rivera, W. M., and D. J. Gustafson (eds.). 1991. *Agricultural Extension : World-wide Institutional Evolution and Forces for Change.* Amsterdam : Elsevier.

Rogers, E. M., and R.A. Rogers. 1976. *Communication in Organization.* The Free Press. New York.

Rogers, E.M., and D.L. Kincaid. 1980. *Communication Networks : Toward a New Paradigm for Research.* Collier Macmillan Publisher. London.

Roling, N., and A. Groot. 1998. *Comptemplating alternatives: A comparative framework for thinking about extension.* Agriculture dan Rural Development: volume 5 nomor 1.

Saragih, B. 1995. *Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Menghadapi Abad Ke-21.* Orasi Ilmiah. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Swanson, B.E. (ed.). 1984. *Agricultural Extension: A Reference Manual.* Food dan Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

World Bank. 1992. *Indonesia: Environment and Development.* A World Bank Country Study. The International Bank for Reconstruction dan Development/ The World Bank, Washington D.C.

van den Ban, A.W., dan H.S. Hawkins. 1999. *Penyuluhan Pertanian.* Terjemahan oleh Agnes Dwina Herdiasti. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

Zimmerer, T.W., and Scarborough, N.M. 1993. *Effective Small Business Management.* Macmillan Publishing Company. New York.